



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Angkat Usaha Mikro Kecil Menengah

Evaluasi Ulang Sirkulasi Keuangan Program Gandeng Gendong

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sejak beberapa waktu lalu menggulirkan program Gandeng Gendong. Salah satu tujuannya demi mengangkat usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Jogja. Namun kenyataannya untuk bergabung dengan program Gandeng Gendong syaratnya tidak mudah. Tidak semua pelaku UMKM dapat memenuhi.

"ITU menjadi catatan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 yang dirumuskan DPRD Kota Yogyakarta," ujar Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta R. Krisma Eka Putra kemarin (29/5).

Krisma bisa memahami dengan catatan dan rekomendasi pansus tersebut. Dia setuju dengan pandangan pansus agar program yang dibayangkan itu benar-benar menjadi inovasi daerah bagi kepentingan masyarakat. Langkah yang perlu dilakukan pemkot dengan mengadakan evaluasi. Khususnya terkait dengan terbentuknya Gandeng Gendong di satu wilayah. Evaluasi itu, sambung wakil rakyat yang tinggal di Kecamatan Kraton ini, dengan meninjau ulang sirkulasi keuangan program Gandeng Gendong. Dikatakan, selama ini pembayaran terhadap pelaku UMKM yang masuk



AKTIF MENDENGAR: Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta R. Krisma Eka Putra mengunjungi Teras Malloboro 2 menyerap aspirasi pedagang kaki lima (PKL) yang menempati kawasan tersebut.

Gandeng Gendong tidak bisa dilakukan seketika. Dengan pengertian setiap snack maupun makanan yang dipesan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk rapat-rapat tak bisa langsung dibayar. Butuh beberapa waktu. Rata-rata ada yang hingga sebulan. Bahkan lebih. Pembayaran yang tertunda dan membutuhkan waktu itu kerap dikeluhkan pelaku UMKM. Sebagian dari mereka tidak punya modal yang cukup. Rata-rata modalnya cekak. Karena itu, saat menunggu pembayaran yang

membutuhkan waktu membuat mereka kerap tidak tahan. "Uang yang mestinya dibayar itu menjadi modal berputar bagi UMKM," katanya. Menyikapi itu, Krisma menilai sebenarnya bukan hal sulit. Selama ini uang yang dipakai untuk membiayai program Gandeng Gendong berasal dari APBD Kota Jogja. Dana APBD itu tersimpan di Bank BPD DIY. Dari Bank BPD DIY uang tida langsung dikeluarkan. Namun ditrasfer lebih dulu ke BPR Bank Jogja. Tagihan dari pelaku UMKM baru terbayar dari uang yang dicairkan dari Bank Jogja. "Sirkulasi keuangan itulah yang

harus dievaluasi," ungkap alumnus FE Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini. Krisma mengatakan, Komisi B bakal meminta mitranya Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta melaksanakan evaluasi tersebut. Permintaan itu akan dilakukan saat rapat kerja. Sebab, rekomendasi Pansus LKPJ wajib ditindaklanjuti. Di bagian lain Krisma juga sepakat dengan upaya mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas hasil produksi. Bentuknya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam promosi. Di

luar itu dengan meningkatkan aksesibilitas UMKM pada lembaga keuangan dalam rangka membantu pembiayaan usaha. Sebagaimana diketahui Program Gandeng Gendong milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah diluncurkan pada tanggal 10 April 2018. Tujuan utama program Gandeng Gendong mengajak seluruh elemen masyarakat saling bergotong-royong membantu warga lain yang masih mengalami kesulitan. Terutama warga miskin agar lebih sejahtera. Pengentasan kemiskinan lebih maksimal bila didukung berbagai pihak seperti perusahaan dengan dana *corporate social responsibility* (CSR). Atau dari perguruan tinggi dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diikuti warga. Kata gendeng bermakna semua elemen masyarakat saling bergandengan tangan dengan niat saling membantu agar semua pihak dapat maju bersama. Kekuatan akan muncul jika semua unsur masyarakat dalam kebersamaan. Sedangkan gendong memiliki makna masyarakat membantu warga lain yang tidak mampu berjalan. Yang lemah digendong. Yang terpinggirkan ditarik ke tengah agar bisa berjalan bersama. Dengan berbagai elemen komunitas, kampus dan kampung saling mengisi. Berkolaborasi serta menggunakan potensi terbaik mendukung pelaksanaan program pembangunan. Kerja sama yang baik antara berbagai elemen masyarakat Kota Jogja menjadi sangat penting. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005